

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Universal Declaration of Human Rights 1948

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR 1966)

The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR 1966)

Act on Political Parties of 24 July 1967 (*Parteiengesetz – PartG*)

Act No. 14 of 2016 (*The Political Party (Amendment) Act*)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 31/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 78/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 32/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 49 K/TUN/2015

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 490 K/TUN/2015

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1976 K/Pdt/2018

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 96 K/Pdt/2016

Putusan PT DKI Jakarta Nomor 521/PDT/2015

Putusan PT DKI Jakarta Nomor 539/PDT/2017/PT.DKI

Putusan PT TUN Jakarta Nomor 162/B/2015/PT.TUN.JKT

Putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT

Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 579/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST

Putusan PN Jakarta Barat Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Brt.

Putusan PN Jakarta Utara Nomor 91/Pdt.G/2015

Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel

### **Risalah Resmi**

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Partai Politik tahun 2007.

Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tahun 2010.

Risalah Pembahasan Tingkat I (Rapat Panja, Rapat Komisi, Rapat Tim Sinkronisasi, dan sebagainya) dan Pembahasan Tingkat II RUU tentang Partai Politik Tahun 2007.

Risalah Pembahasan Tingkat I (Rapat Panja, Rapat Komisi, Rapat Tim Sinkronisasi, dan sebagainya) dan Pembahasan Tingkat II RUU tentang Partai Politik Tahun 2010

## **Buku**

- Adji, O.S. & Indriyanto Seno Adji, 1980, *Peradilan Bebas dan Contempt of Court*, Diadit Media, Jakarta.
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2023, *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Rajawali Press, Depok.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Bruggink, J.J.H., 1996, *Refleksi Tentang Hukum (terjemahan oleh Arief Sidharta)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budiarjo, Miriam, 2000, *Pengantar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Budiarjo, Miriam, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Cangara, Hafied, 2009, *Komunikasi Politik*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Demsetz, Harold, 1982, *Economic, Legal, and Political Dimensions of Competition*, North-Holland, Amsterdam.
- Downs, Anthony, 1957, *An Economic Theory of Democracy*, Harper, New York.
- Fadjar, A.M., 2012, *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Fajar, M. dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Firmanzah, 2011, *Mengelola Partai Politik*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hadjon, Philipus M., 2000, *Pembangunan Hukum dalam Penyelenggaraan Negara Demokrasi*, Makalah UDU, Jombang.
- HR, Ridwan, 2020, *Hukum Administrasi Negara: edisi revisi*, Rajawali Press, Depok.
- Huntington, Samuel P., 1983, *Tertib Politik pada Masyarakat yang Sedang Berubah*, Rajawali, Jakarta.
- Huntington, Samuel P. sebagaimana diterjemahkan oleh Sahat Simamora dan Suryatin, 2004, *Tertib Politik pada Masyarakat yang Sedang Berubah*, Rajawali Press, Jakarta
- Ibrahim, Johnny, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, Malang.

- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- Iver, Mac, 1955, *The Modern State*, Oxford University Press, London.
- Kabudi, P.J., 1955, *Human Rights Jurisprudence in East Africa: A Comparative Study of Fundamental Rights and Freedom of the Individual in Tanzania, Kenya, and Uganda*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden.
- Katz, R. dan William Crotty, 2014, *Handbook Partai Politik*, Nusamedia, Bandung, hlm. 721.
- Labolo, M. dan Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep, dan Isu Strategis*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Langford, Paul, 1981, *The Writings and Speeches of Edmund Burke*, Clarendon Press, Oxford.
- Malik, “Telaah Makna Hukum Putusan MK Yang Final dan Mengikat”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, April 2009.
- Manan, B. dan Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Marzuki, P.M., 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- MD, Moh. Mahfud, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2020, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, CV Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
- Meyer, Thomas 2009, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Jakarta.
- Meyer, Thomas, 2012, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis, cet. 3*, Friedrich-Ebert Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia, Jakarta.
- Mochtar, Z.A. & Eddy O.S Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Red & White Publishing, Jakarta.
- Mochtar, Z.A., 2022, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, EA Books, Sleman.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB.
- Pruitt, D. G. & Z. Rubin, 2004, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Rakia, S.R.S., "Simplifikasi Terhadap Peraturan-Peraturan Pelaksanaan yang Dibentuk oleh Presiden dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2021.
- Sartori, Giovanni, 1976, *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis, Volume I*, Cambridge University Press, New York.
- Surbakti, R. & Didik Supriyanto, 2013, *Mendorong Demokratisai Internal Partai Politik*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta.
- Scarrow, Susan, 2005, *Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical Perspectives: Implementing Intra-Party Democracy*, National Democratic Institute For International Affairs, Washington DC.
- Schattschneider, E.E., 1942, *Party Government*, Rinehart, New York.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat, 1976, *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak Di Indonesia*, PT Eresco, Bandung.
- Sorouf, Frank. J., 1972, *Party Politics in America, Second Edition*, Little, Brown, and Company, Boston.
- Yuliandri, 2011, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Qamar, Nurul, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*, Pustaka Refleksi, Makassar.

## **Jurnal**

- Adonara, F. F., "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, Juni 2015.
- Akmal, Zaiyatul, "Konflik Internal Partai Keadilan Sejahtera Tahun 2016: Studi Kasus Konflik Fahri Hamzah dengan Pimpinan DPP PKS", *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 10, No. 1, April 2019.
- Alexy, Robert, "The Absolute and the Relative Dimension of Constitutional Rights", *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 37, No. 1, 2017.
- Alexy, Robert, "Proportionality, Constitutional Law, and sub-constitutional law: A reply to Aharon Barak", *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 16, No. 3, Juli 2018.

- Azzahra, Farida, “Rekonstruksi Badan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik: Studi Kedudukan Mahkamah Partai Politik di Indonesia”, *Jurnal Crepido*, Vol. 4, No. 2, November 2022.
- Buana, M.S., “Kelindan Antara ‘Hak Negatif’ dengan ‘Hak Positif’ dalam Diskursus Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmu Hukum Veritas Et Justitia*, Vol. 9, No. 1, Juli 2023.
- Effendi, Z. & Selamat Lumban Gaol, dan Nurlely Darwis, “Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai Lembaga Quasi Yudisial dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia”, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 12, No. 2, Desember 2023.
- Fadillah, Nor, “Prinsip Peradilan Bebas dan Tidak Memihak dalam Negara Hukum: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2017 Mengeai Verifikasi Partai Politik”, *Lex Renaissance*, Vol. 8, No.1, Juni 2023.
- Firdaus dan Nalom Kurniawan, “Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 3, September 2017.
- Helmke, G. & Steven Levitsky, “Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda”, *Perspectives on Politics*, Vol. 2, No. 4, Desember 2004.
- Levitsky, Steven, “Institutionalization and Peronism: The Concept, the Case and the Case for Unpacking the Concept”, *Party Politics 4*, Vol. 4, No. 1, 1998.
- Permana, Tri Cahya Indra “Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 1, Maret 2016.
- Poenene, A.A., Toar N. Pailingan, dan Rudy R. Watulingas, “Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi: Lex Privatum*, Vol. 12, No. 3, November 2023.
- Rachman, M. A., “Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik”, *Yuridika*, Vol. 31, No. 2, Mei 2016.
- Randall dan Svasand, 2002, “Party institutionalization in New Democracies”, *Party Politics*, Vol. 8, No. 1, 2002.
- Risnain, Muh., “Eksistensi Lembaga Quasi Judisial dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, No. 1, Maret 2014.

Rokilah dan Sulasno, “Penerapan Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, Desember 2021.

Romli, Lili, “Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia”, *Politica*, Vol. 2, No. 2, November 2011.

### **Penelitian Ilmiah**

Attamimi, A. Hamid S., 1990, *Peranan Keputusan Presiden Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Program Doktor Universitas Indonesia, Jakarta.

Bisariyadi, Abdul Ghoffar, Intan Permata Putri, 2014, “Konstitusionalitas Pembatasan Kebebasan Berserikat: Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Mahkamah Konstitusi”, *Laporan Penelitian*, Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Safira, A. D., 2022, “Implikasi Status Hukum Partai Politik Sebagai Badan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

### **Internet**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI VI Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/susunan>, diakses 7 Juli 2025.

Detiknews, “Lukman Edy Silakan Bakal Caleg PKB Yenny Daftar Lagi”, <https://news.detik.com/berita/d-974264/lukman-edy-silakan-bakal-caleg-pkb-yenny-daftar-lagi>, diakses 3 Mei 2025.

DetikNews, “Ini Isi Amar Putusan Mahkamah Partai Golkar”, <https://news.detik.com/berita/d-2883360/ini-isi-amar-putusan-mahkamah-partai-golkar>, diakses 9 Juli 2025.

Heppy Ratna S, “Profil Partai: PPD di Tengah Konflik Internal”, *antaranews*, <https://www.antaranews.com/berita/126895/profil-partai-ppdi-di-tengah-konflik-internal>, diakses 4 Juli 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Mahkamah”, <https://kbbi.web.id/mahkamah>, diakses 12 Mei 2025.

Marlinda Oktavia Erwanti, “Perjalanan Kasus Fahri Vs PKS Hingga MA Hapus Ganti Rugi Rp 30 M”, *detik.com*, <https://news.detik.com/berita/d->

[5295719/perjalanan-kasus-fahri-vs-pks-hingga-ma-hapus-ganti-rugi-rp-30-m/2](#), diakses 20 November 2024.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Direktori Putusan: Putusan Register Per Tahun Parpol”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/regist/kategori/parpol-1.html>, diakses 5 Mei 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Mahkamah”, <https://kbbi.web.id/mahkamah>, diakses 12 Mei 2025.

### **Lain-Lain**

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Tahun 2011.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera Tahun 2016.

Pedoman Partai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberian Penghargaan dan Penjatuhan Sanksi Partai Keadilan Sejahtera.

Pedoman Partai Nomor 2 Tahun 2015 tentang tentang Tata Cara Beracara Penegakan Disiplin Organisasi Partai Keadilan Sejahtera mengenai Tugas, Wewenang dan Kewajiban.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.AH.11.03-26.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.11.01.

Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor 324/ DPP/GOLKAR/2014.

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor: 06/D/SKEP/DPTP-PKS/IV/1437.

Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor 463/SKEP/DPP-PKS/1437.

Putusan Majelis Qadha Partai Keadilan Sejahtera Nomor 01/PUT/PDO-PKS/1437.

Putusan Majelis Tahkim Partai Keadilan Sejahtera Nomor 02/PUT/MT-PKS/2016.

Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 01/P1-GOLKAR/II/2015, 02/P1-GOLKAR/II/2015, dan 03/P1-GOLKAR/II/2015.

Surat Mahkamah Partai Golkar Nomor 008/MP.GK/2015.